



KABUPATEN SRAGEN

**PERATURAN DESA SIDOHARJO
NOMOR 06 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SIDOHARJO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49, Ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengesahan Dokumen RKP Desa dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang Perubahan KEDUA RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Sidoharjo tentang Perubahan KEDUA Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sragen dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
 8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
18. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
19. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 961);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun

2018 Nomor 4);

21. Peraturan Bupati Sragen Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2018 Nomor 72);
22. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Desa Sidoharjo Tahun 2020 Nomor 04);
23. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sidoharjo Tahun 2020 Nomor 12);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOHARJO
dan
KEPALA DESA SIDOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN KEDUA
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN
ANGGARAN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah KEDUAan masyarakat h.ukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara KEDUAan Republik Indonesia.
2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan,

- pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
5. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
 6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara KEDUAan Republik Indonesia.
 8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
 11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
 12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
 13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka

peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.

14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
15. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
22. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya

lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.

23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
25. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
27. Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
28. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
29. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
30. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
31. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola

usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

32. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan/atau APB Desa.

BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun Anggaran 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan dan Manfaat.
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa.
- 1.5. Sistematika.

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- 2.1. Visi – Misi Kepala Desa.
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
- 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
- 2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
- 2.5. Gambaran Umum Infrastruktur.

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA:

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2025.
- 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
- 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
- 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2026.
- 4.5. Kebijakan Keuangan Desa.

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN

1. Rancangan Perubahan KEDUA RKP Desa Tahun Anggaran 2025.
2. Rancangan Batang Tubuh Perubahan KEDUA RKP Desa Tahun Anggaran 2025.
3. Evaluasi RKP Desa tahun 2025.
4. Gambar Desain Kegiatan.
5. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
6. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2026.
7. Berita acara hasil penyusunan rancangan Perubahan KEDUA RKP Desa.
8. Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Musrenbang Desa Khusus Perubahan KEDUA RKP Desa Tahun Anggaran 2025.
9. Tata tertib musrenbang Desa Khusus Perubahan KEDUA RKP Desa.
10. Berita Acara Musrenbang Desa Khusus Perubahan KEDUA RKP Desa Tahun Anggaran 2025, Notulen dan Daftar Hadir.
11. Rancangan Peraturan Desa Tentang Khusus Perubahan KEDUA RKP Desa, Notulen, Daftar Hadir.
12. Peraturan Desa tentang Khusus Perubahan KEDUA RKP Desa Tahun Anggaran 2025.
13. Dokumen Khusus Perubahan KEDUA RKP Desa Tahun Anggaran 2025.
14. Peta Desa.

- (2) Penjabaran sistematika Perubahan KEDUA RKP Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Perubahan KEDUA RKP Desa Tahun Anggaran 2025 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun Anggaran 2025.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan

Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.



Ditetapkan di : Desa Sidoharjo

Pada tanggal : 07 JULI 2025

KEPALA DESA SIDOHARJO,

THUK SAPTAWATI

Diundangkan di : Desa Sidoharjo

Pada tanggal : 07 Juli 2025

SEKRETARIS DESA SIDOHARJO

SUGIWANTO

LEMBARAN DESA SIDOHARJO TAHUN 2024 NOMOR 14

**PERUBAHAN KEDUA RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

DESA : SIDOHARJO
KECAMATAN : SIDOHARJO
KABUPATEN : SRAGEN
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang / Sub Bidang / Jenis kegiatan				Mendukung SDGs Desa ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2025	Lokasi (RT/RW/ Desa)	Volume	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (swakelola/ kerjasama antar desa/ kerjasama pihak ketiga)	Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA)			
	Bidang		Sub Bidang	Jenis kegiatan								Jumlah (Rp.)	Sumber Dana					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.1	Penyelenggaraan Belanja Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.1.1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa													
				1	Penghasilan Tetap kepala Desa	1, 17	1 orang telah memenuhi pagu maksimal	1 orang telah memenuhi pagu maksimal	Desa	13,00	OB	1 orang	12 bulan	52.000.000	ADD	swakelola	Kaur Keuangan	
				2	Tunjangan Kepala Desa dari Bengkulu	1, 17	1 orang telah memenuhi pagu maksimal	1 orang telah memenuhi pagu maksimal	Desa	12,00	OB	1 orang	12 bulan	48.000.000	PAD	swakelola	Kaur Keuangan	
				1.1.2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa													
				1	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	1, 17	10 orang telah memenuhi pagu maksimal	10 orang telah memenuhi pagu maksimal	Desa	130,00	OB	10 orang	12 bulan	302.900.000	ADD	swakelola	Kaur Keuangan	
				2	Tunjangan Perangkat Desa dari Bengkulu	1, 17	8 orang telah memenuhi pagu maksimal	8 orang telah memenuhi pagu maksimal	Desa	96,00	OB	8 orang	12 bulan	126.000.000	PAD	swakelola	Kaur Keuangan	
				2	Tunjangan P.J. Perangkat Desa	1, 17	2 orang telah memenuhi pagu maksimal	2 orang telah memenuhi pagu maksimal	Desa	24,00	OB	2 orang	12 bulan	10.800.000	PAD	swakelola	Kaur Keuangan	
				1.1.3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa													
				1	Jaminan Sosial Kepala Desa	1,3	1 orang terpenuhi jaminan sosial kades	1 orang terpenuhi pagu	Desa	12,00	OB	1 orang	12 bulan	2.995.200	ADD	swakelola	Kaur Keuangan	
				2	Jaminan Sosial Perangkat Desa	1,3	10 orang terpenuhi jaminan sosial perangkat desa	10 orang terpenuhi pagu	Desa	120,00	OB	10 orang	12 bulan	17.447.400	ADD	swakelola	Kaur Keuangan	
				1.1.4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa													
				1	Belanja Alat Tulis kantor & Benda Pos	1, 17	terpenuhinya kebutuhan regulir	terpenuhinya kebutuhan regulir	Desa	1,00	paket	9 orang	12 bulan	8.647.896	Silpa PAD	swakelola	Kaur Umum & TU	
				2	Belanja Perlengkapan Alat -alat Listrik	1, 17	terpenuhinya kebutuhan regulir	terpenuhinya kebutuhan regulir	Desa	1,00	paket	9 orang	12 bulan	1.750.000	PAD	swakelola	Kaur Umum & TU	
				3	Belanja Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan	1, 17	terpenuhinya kebutuhan regulir	terpenuhinya kebutuhan regulir	Desa	1,00	paket	9 orang	12 bulan	2.750.000	PAD	swakelola	Kaur Umum & TU	
				4	Belanja Bahan Bakar	1, 17	terpenuhinya kebutuhan regulir	terpenuhinya kebutuhan regulir	Desa	1,00	paket	9 orang	12 bulan	750.000	PAD	swakelola	Kaur Umum & TU	

No	Bidang / Sub Bidang / Jenis kegiatan				Mendukung SDGs Desa ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2025	Lokasi (RT/RW/ Desa)	Volume	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (swakelola/ kerjasama antar desa/ kerjasama pihak ketiga)	Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA)						
	Bidang		Sub Bidang	Jenis kegiatan								Jumlah (Rp.)	Sumber Dana								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
					5 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1, 17	terpenuhinya kebutuhan reguler	terpenuhinya kebutuhan reguler	Desa	1,00 paket	9 orang	12 bulan	9.500.000	PAD	swakelola	Kaur Umum & TU					
					6 Biaya Konsumsi	1, 17	terpenuhinya kebutuhan reguler	terpenuhinya kebutuhan reguler	Desa	1,00 paket	9 orang	12 bulan	24.405.000	PAD	swakelola	Kaur Umum & TU					
					7 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	1, 17	terpenuhinya kebutuhan reguler	terpenuhinya kebutuhan reguler	Desa	1,00 paket	9 orang	12 bulan	1.000.000	PAD	swakelola	Kaur Umum & TU					
					8 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	1, 17	terpenuhinya kebutuhan reguler	terpenuhinya kebutuhan reguler	Desa	1,00 paket	9 orang	12 bulan	7.200.000	PAD	swakelola	Kaur Umum & TU					
					9 Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan Lelang TKD	1, 17	terpenuhinya kebutuhan reguler	terpenuhinya kebutuhan reguler	Desa	1,00 paket	9 orang	12 bulan	3.850.000	PAD	swakelola	Kaur Umum & TU					
					10 Honorarium Petugas PKPKD	1, 17	terpenuhinya kebutuhan reguler	terpenuhinya kebutuhan reguler	Desa	1,00 paket	9 orang	12 bulan	16.200.000	ADD	swakelola	Kaur Umum & TU					
					11 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator	1, 17	terpenuhinya kebutuhan reguler	terpenuhinya kebutuhan reguler	Desa	1,00 paket	9 orang	12 bulan	-	PAD	swakelola	Kaur Umum & TU					
					12 Belanja Jasa Honorarium Staff Administrasi BPD	1, 17	terpenuhinya kebutuhan reguler	terpenuhinya kebutuhan reguler	Desa	1,00 paket	1 orang	12 bulan	3.000.000	PAD	swakelola	Kaur Umum & TU					
					13 Belanja Perjalanan Dinas	1, 17	terpenuhinya kebutuhan reguler	terpenuhinya kebutuhan reguler	Desa	1,00 paket	9 orang	12 bulan	3.500.000	PAD	swakelola	Kaur Umum & TU					
					14 Belanja Jasa Langganan Listrik	1, 17	terpenuhinya kebutuhan reguler	terpenuhinya kebutuhan reguler	Desa	1,00 paket	9 orang	12 bulan	23.000.000	Silpa PAD	swakelola	Kaur Umum & TU					
					15 Belanja Jasa Langganan PDAM	1, 17	terpenuhinya kebutuhan reguler	terpenuhinya kebutuhan reguler	Desa	1,00 paket	9 orang	12 bulan	3.000.000	PAD	swakelola	Kaur Umum & TU					
					16 Belanja Jasa Langganan Internet	1, 17	terpenuhinya kebutuhan reguler	terpenuhinya kebutuhan reguler	Desa	1,00 paket	9 orang	12 bulan	8.400.000	PAD	swakelola	Kaur Umum & TU					
					17 Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	1, 17	terpenuhinya kebutuhan reguler	terpenuhinya kebutuhan reguler	Desa	1,00 paket	9 orang	12 bulan	7.500.000	PAD+ Silpa	swakelola	Kaur Umum & TU					
					18 Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat	1, 17	terpenuhinya kebutuhan reguler	terpenuhinya kebutuhan reguler	Desa	1,00 paket	9 orang	12 bulan	11.400.000	PAD	swakelola	Kaur Umum & TU					
					19 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	1, 17	terpenuhinya kebutuhan reguler	terpenuhinya kebutuhan reguler	Desa	1,00 paket	9 orang	12 bulan	3.000.000	PAD	swakelola	Kaur Umum & TU					
					20 Belanja Pemeliharaan Peralatan	1, 17	terpenuhinya kebutuhan reguler	terpenuhinya kebutuhan reguler	Desa	1,00 paket	9 orang	12 bulan	6.900.000	PAD	swakelola	Kaur Umum & TU					
					21 Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi	1, 17	terpenuhinya kebutuhan reguler	terpenuhinya kebutuhan reguler	Desa	1,00 paket	9 orang	12 bulan	2.000.000	PAD	swakelola	Kaur Umum & TU					
					22 BPJS Ketenagakerjaan Pekerja Rentan	1, 17	terpenuhinya kebutuhan reguler	terpenuhinya kebutuhan reguler	Desa	1,00 paket	10 orang	12 bulan	2.016.000	ADD	swakelola	Kaur Umum & TU					
					23 Admin Bank	1, 17	terpenuhinya kebutuhan reguler	terpenuhinya kebutuhan reguler	Desa	1,00 paket	9 orang	12 bulan	5.000.000	PLL	swakelola	Kaur Umum & TU					
									1.1.5	Penyediaan Tunjangan BPD											

No	Bidang / Sub Bidang / Jenis kegiatan				Mendukung SDGs Desa ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2025	Lokasi (RT/RW/ Desa)	Volume	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (swakelola/ kerjasama antar desa/ kerjasama pihak ketiga)	Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA)							
	Bidang		Sub Bidang	Jenis kegiatan								Jumlah (Rp.)	Sumbe Dana									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
					1 Tunjangan BPD	1, 17	7 orang telah memenuhi pagu definitif	7 orang telah memenuhi pagu definitif	Desa	84,00 OB	7 orang	12 bulan	31.800.000	ADD	swakelola	Kaur Keuangan						
					2 Jaminan Sosial Ketenagakerjaan BPD	1,3	7 orang terpenuhi jaminan sosial BPD	7 orang terpenuhi pagu	Desa	84,00 OB	7 orang	12 bulan	1.411.200	ADD	swakelola	Kaur Keuangan						
					1.1.6	Penyediaan Operasional BPD																
					1	Operasional BPD	1, 17	terpenuhinya kebutuhan reguler	terpenuhinya kebutuhan reguler	Desa	1,00 paket	7 orang	12 bulan	33.000.000	PAD	swakelola	Kaur Umum & TU					
					1.1.7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW																
					1	Insentif RT/RW	1, 17	23 orang telah memenuhi pagu definitif	23 orang telah memenuhi pagu definitif	Desa	276,00 OB	23 orang	12 bulan	96.600.000	ADD	swakelola	Kaur Keuangan					
					2	Jaminan Sosial Ketenagakerjaan RT	1,3	23 orang terpenuhi jaminan sosial RT	23 orang terpenuhi pagu	Desa	276,00 OB	23 orang	12 bulan	4.636.600	ADD	swakelola	Kaur Keuangan					
					3	Operasional RT/RW	1, 17	terpenuhinya kebutuhan reguler	terpenuhinya kebutuhan reguler	Desa	1,00 paket	23 orang	12 bulan	27.600.000	PAD	swakelola	Kaur Keuangan					
					1.1.8	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang Bersumber dari Dana Desa																
					1	Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa	16	terpenuhinya kebutuhan reguler	terpenuhinya kebutuhan reguler	Desa	12,00 kali	9 orang	Januari s.d Desember	9.250.000	DDS	swakelola	Kaur Umum & TU					
					2	Bantuan uang untuk Korban Bencana	16	terpenuhinya kebutuhan reguler	terpenuhinya kebutuhan reguler	Desa	20,00 paket	20 orang	Agustus	10.000.000	DDS	swakelola	Kaur Umum & TU					
					1.2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	1.2.1	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan														
					1	Pengadaan Laptop		16	terpenuhinya sarpras kantor desa	terpenuhinya sarpras kantor desa	Desa	1,00 unit	1 orang	20 hari	13.376.025	Silpa PBH	swakelola	Kaur Umum & TU				
					2	Pengadaan Korden Pintu Kantor		16	terpenuhinya sarpras kantor desa	terpenuhinya sarpras kantor desa	Desa	1,00 unit	9 orang	20 hari	2.000.000	Silpa PBH	swakelola	Kaur Umum & TU				
					3	Pengadaan Tempat Tidur Penjaga Kantor		16	terpenuhinya sarpras kantor desa	terpenuhinya sarpras kantor desa	Desa	1,00 unit	1 orang	20 hari	2.000.000	Silpa PAD	swakelola	Kaur Umum & TU				
					4	Pengaman AC Kantor BPD		16	terpenuhinya sarpras kantor desa	terpenuhinya sarpras kantor desa	Desa	1,00 unit	1 orang	20 hari	1.000.000	Silpa PAD	swakelola	Kaur Umum & TU				
					5	Pengadaan Kotak Saran		16	terpenuhinya sarpras kantor desa	terpenuhinya sarpras kantor desa	Desa	1,00 unit	1 orang	20 hari	2.000.000	Silpa PAD	swakelola	Kaur Umum & TU				
					6	Pengadaan Printer		16	terpenuhinya sarpras kantor desa	terpenuhinya sarpras kantor desa	Desa	2,00 unit	9 orang	20 hari	5.000.000	PAD	swakelola	Kaur Umum & TU				
										7	Pengadaan Listrik Gedung PKK	16	terpenuhinya sarpras kantor desa	terpenuhinya sarpras kantor desa	Desa	1,00 unit	9 orang	20 hari	6.000.000	PAD	swakelola	Kaur Umum & TU

No	Bidang / Sub Bidang / Jenis kegiatan				Mendukung SDGs Desa ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan		Target Capaian Tahun 2025		Lokasi (RT/RW/ Desa)	Volume	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaa an	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (swakelola/ kerjasama antar desa/ kerjasama pihak ketiga)	Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA)			
	Bidang		Sub Bidang	Jenis kegiatan		Jumlah (Rp.)	Sumbe Dana													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
				1.2.2	8. Pengadaan Meja Kursi Rapat	16	terpenuhinya sarpras kantor desa	terpenuhinya sarpras kantor desa	Desa	1,00 paket	9 orang	20 hari	14.000.000	PAD	swakelola	Kaur Umum & TU				
					Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa															
					1. Pengecatan Gedung Kantor	16	terpenuhinya sarpras kantor desa	terpenuhinya sarpras kantor desa	Desa	2,00 unit	11 orang	20 hari	11.511.000	PBH	swakelola	Kaur Umum & TU				
					2. Pengecatan Pagar Kantor	16	terpenuhinya sarpras kantor desa	terpenuhinya sarpras kantor desa	Desa	1,00 unit	11 orang	20 hari	10.000.000	PBH	swakelola	Kaur Umum & TU				
					3. Pengecatan kantor BPD	16	terpenuhinya sarpras kantor desa	terpenuhinya sarpras kantor desa	Desa	1,00 unit	11 orang	20 hari	9.000.000	PBH	swakelola	Kaur Umum & TU				
					4. Pemeliharaan Gedung PKK & Perpustakaan/Plafon	16	terpenuhinya sarpras kantor desa	terpenuhinya sarpras kantor desa	Desa	1,00 unit	11 orang	20 hari	6.500.000	PBH	swakelola	Kaur Umum & TU				
				1.3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1.3.2	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa													
							1. Pemutakhiran Profil Desa (Prodeskel)	16	terpenuhinya data profil desa	terpenuhinya data profil desa	Desa	1,00 paket	9 orang	Januari	1.575.000	PAD	swakelola	Kasi Pemerintahan		
							2. Penyusunan Sejarah Desa	16	terpenuhinya data Sejarah Desa	terpenuhinya data Sejarah Desa	Desa	1,00 paket	4.045 orang	Maret	15.000.000	DDS	swakelola	Kasi Pemerintahan		
						1.3.5	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif													
							1. Kegiatan Pendataan Simanangkis	16	terpenuhinya data Kemiskinan Desa	terpenuhinya data Kemiskinan Desa	Desa	1,00 paket	1.000 KPM	Januari s.d Maret	4.430.000	DDS	swakelola	Kaur Perencanaan		
							2. Kegiatan Pendataan SIKS-NG	16	terpenuhinya data Kemiskinan Desa	terpenuhinya data Kemiskinan Desa	Desa	1,00 paket	500 KPM	Januari s.d Maret	1.730.000	DDS	swakelola	Kaur Perencanaah		
				1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1.4.1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa (reguler)													
							1. Terselenggaranya Musyawarah Desa Perencanaan Desa (RKP Desa)	16	terpenuhinya legalitas RKP Desa	terpenuhinya legalitas RKP Desa	Desa	1,00 kali	9 orang	Juni s.d September	1.200.000	PAD	swakelola	Kasi Pemerintahan		
							2. Terselenggaranya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)	16	terpenuhinya legalitas musrenbangdes	terpenuhinya legalitas musrenbangdes	Desa	1,00 kali	9 orang	Agustus s.d September	1.200.000	PAD	swakelola	Kasi Pemerintahan		
							3. Musyawarah Desa Pembahasan & Penetapan RKP Desa	16	terpenuhinya legalitas RKP Desa	terpenuhinya legalitas RKP Desa	Desa	1,00 kali	9 orang	September	1.200.000	PAD	swakelola	Kaur Perencanaan		

No	Bidang / Sub Bidang / Jenis kegiatan				Mendukung SDGs Desa ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2025	Lokasi (RT/RW/ Desa)	Volume	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaa an	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (swakelola/ kerjasama antar desa/ kerjasama pihak ketiga)	Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA)		
	Bidang		Sub Bidang	Jenis kegiatan								Jumlah (Rp.)	Sumbe Dana				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
					4	Musrenbangdesa Khusus Perubahan RKP Desa	16	terpenuhinya legalitas Perubahan RKP Desa	terpenuhinya legalitas Perubahan RKP Desa	Desa	1,00 kali	9 orang	Januari s.d Desember	1.200.000	Silpa PAD	swakelola	Kaur Perencanaan
					5	Musyawarah Desa Penetapan Rancangan APB Desa	16	terpenuhinya legalitas APB Desa	terpenuhinya legalitas APB Desa	Desa	1,00 kali	9 orang	Oktober	1.200.000	PAD	swakelola	Kaur Perencanaan
					6	Musyawarah Desa Penetapan APB Desa	16	terpenuhinya legalitas APB Desa	terpenuhinya legalitas APB Desa	Desa	1,00 kali	9 orang	Desember	1.200.000	PAD	swakelola	Kaur Perencanaan
					7	Musyawarah Desa Sosialisasi APB Desa	16	Terlaksananya Tranparansi APB Desa	Terlaksananya Tranparansi APB Desa	Desa	1,00 kali	9 orang	Januari	1.200.000	Silpa PAD	swakelola	Kaur Perencanaan
					8	Musyawarah Desa Perubahan APB Desa	16	terpenuhinya legalitas Perubahan APB Desa	terpenuhinya legalitas Perubahan APB Desa	Desa	1,00 kali	9 orang	Oktober	1.200.000	PAD	swakelola	Kaur Perencanaan
					9	Musyawarah Desa Realisasi APB Desa Semester Pertama	16	Terlaksananya Tranparansi Pelaksanaan APB Desa	Terlaksananya Tranparansi Pelaksanaan APB Desa	Desa	1,00 kali	9 orang	Juli	1.200.000	PAD	swakelola	Kaur Perencanaan
					10	Musyawarah Desa Realisasi Pertanggungjawaban APB Desa	16	Terlaksananya Tranparansi Pelaksanaan APB Desa	Terlaksananya Tranparansi Pelaksanaan APB Desa	Desa	1,00 kali	9 orang	Januari	1.200.000	Silpa PAD	swakelola	Kaur Perencanaan
					1.4.2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (non reguler)											
					1	Musdesdus Penerima BLT	16	terpenuhinya legalitas Penerima BLT	terpenuhinya legalitas Penerima BLT	Desa	2,00 kali	22 orang	Januari & Juli	2.400.000	Silpa PAD	swakelola	Kasi Pemerintahan
					2	Musyawarah Dusun & Kelompok	16	terpenuhinya legalitas Administrasi Desa	terpenuhinya legalitas Administrasi Desa	Desa	5,00 kali	11 orang	Januari s.d Mei	3.000.000	PAD	swakelola	Kasi Pemerintahan
				3	Musyawarah Desa Rembug Stunting	16	terpenuhinya legalitas Stunting	terpenuhinya legalitas Stunting	Desa	2,00 kali	9 orang	Maret	1.200.000	DDS	swakelola	Kasi Pemerintahan	
				4	Musyawarah Desa Penetapan Masterplan & Batas Desa	16	terpenuhinya legalitas Master Plan & Batas	terpenuhinya legalitas Master Plan & Batas	Desa	2,00 kali	9 orang	Oktober	2.400.000	PAD	swakelola	Kasi Pemerintahan	
				5	Musyawarah Desa Pertanggungjawaban Bumdes	16	Terlaksananya Tranparansi Pelaksanaan Bumdes	Terlaksananya Tranparansi Pelaksanaan Bumdes	Desa	2,00 kali	9 orang	Januari & Juli	2.400.000	PAD	swakelola	Kasi Pemerintahan	
6	Musyawarah Desa Sosialisasi Kebijakan Desa	16	terpenuhinya legalitas Master Plan & Batas Desa	terpenuhinya legalitas Master Plan & Batas Desa	Desa	10,00 kali	9 orang	Januari s.d Desember	8.250.000	PAD	swakelola	Kasi Pemerintahan					

No	Bidang / Sub Bidang / Jenis kegiatan				Mendukung SDGs Desa ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2025	Lokasi (RT/RW/ Desa)	Volume	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (swakelola/ kerjasama antar desa/ kerjasama pihak ketiga)	Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA)			
	Bidang		Sub Bidang	Jenis kegiatan								Jumlah (Rp.)	Sumber Dana					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
				1.4.3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa													
				1	Penyusunan Dokumen RKP Desa	16	terpenuhinya operasional penyusunan dokumen RKP Desa	terpenuhinya penyusunan dokumen RKP Desa yang baik	Desa	1,00 paket	11 orang	Juni s.d September	9.425.000	PAD	swakelola	Kaur Perencanaan		
				2	Penyusunan Perubahan RPJM Desa	16	terpenuhinya operasional penyusunan dokumen RKP Desa	terpenuhinya penyusunan dokumen RKP Desa yang baik	Desa	1,00 paket	11 orang	Juni s.d September	4.304.000	DDS	swakelola	Kaur Perencanaan		
				1.4.4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa													
				1	Penyusunan Realisasi, Rancangan, Penetapan & Perubahan APB Desa	16	terpenuhinya operasional penyusunan dokumen APB Desa	terpenuhinya operasional penyusunan dokumen APB Desa yang baik	Desa	5,00 paket	9 orang	Januari, Juli, Oktober, Nopember & Desember	10.425.000	PAD	swakelola	Kaur Perencanaan		
				1.4.5	Pengelolaan/Administrasi/inventarisasi /Penilaian Aset Desa													
				1	Penilaian Aset Desa	16	terpenuhinya operasional penyusunan dokumen Aset Desa	terpenuhinya operasional penyusunan dokumen Aset Desa yang baik	Desa	1,00 paket	9 orang	Maret s.d Mei	15.631.400	ADD	swakelola	Kaur Umum & TU		
				2	Pengelolaan Administrasi Aset Desa	16	terpenuhinya operasional penyusunan dokumen Aset Desa	terpenuhinya operasional penyusunan dokumen Aset Desa yang baik	Desa	1,00 paket	4 orang	Januari s.d Desember	10.500.000	PAD	swakelola	Kaur Umum & TU		
				1.4.6	Penyusunan Kebijakan Desa													
				1	Penyusunan Perdes, Perkades & SK	16	terpenuhinya operasional penyusunan dokumen perdes/perkades	terpenuhinya penyusunan dokumen perdes/perkades yang baik	Desa	10,00 paket	9 orang	Januari s.d Desember	6.825.000	PAD	swakelola	Kasi Pemerintahan		
				1.4.7	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Pejabat/Pemerintahan Desa													
				1	Penyusunan LPPD, IPPD & LKPPD	16	terpenuhinya operasional penyusunan dokumen LPPD, IPPD & LKPPD	terpenuhinya penyusunan dokumen LPPD, IPPD & LKPPD yang baik	Desa	1,00 paket	9 orang	Januari	2.630.000	Silpa PAD	swakelola	Kaur Perencanaan		
				1.4.8	Pengembangan Sistem Informasi Desa													

No	Bidang / Sub Bidang / Jenis kegiatan				Mendukung SDGs Desa ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2025	Lokasi (RT/RW/ Desa)	Volume	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaa an	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (swakelota/ kerjasama antar desa/ kerjasama pihak ketiga)	Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA)			
	Bidang	Sub Bidang		Jenis kegiatan								Jumlah (Rp.)	Sumbe Dana					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
					1 Penyusunan Indeks Desa Membangun (IDM)	16	terpenuhinya data IDM	terpenuhinya data IDM	Desa	1,00 paket	9 orang	Januari	1.575.000	PAD	swakelota	Kasi Pemerintahan		
					2 Pemutakhiran SDGs Desa	16	terpenuhinya data SDGs	terpenuhinya data SDGs	Desa	1,00 paket	9 orang	Januari	7.500.000	PAD	swakelota	Kasi Pemerintahan		
					3 Pemutakhiran eHDW Desa	16	terpenuhinya data eHDW	terpenuhinya data eHDW	Desa	1,00 paket	9 orang	Januari	1.260.000	PAD	swakelota	Kasi Pemerintahan		
					4 Pemutakhiran Epdeskel Desa	16	terpenuhinya data Epdeskel	terpenuhinya data Epdeskel	Desa	1,00 paket	9 orang	Januari	1.575.000	PAD	swakelota	Kasi Pemerintahan		
					5 Pengembangan Website Desa	16	terpenuhinya Operasional Website Desa	terpenuhinya Operasional Website Desa	Desa	1,00 paket	9 orang	Januari s.d Juni	30.000.000	DDS	swakelota	Kasi Pemerintahan		
				1.4.10 Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD														
					1 Pemilihan Ketua RT	16	Terpenuhinya Operasional Pemilihan Ketua RT	Terpenuhinya Operasional Pemilihan Ketua RT	Desa	23,00 kali	23 Orang	Nopember	20.793.000	PAD	swakelota	Kasi Pemerintahan		
					2 Pembentukan Pengurus TP PKK, Kader Kesehatan, Kader Posyandu	16	Terpenuhinya Operasional Pembentukan Lembaga Desa	Terpenuhinya Operasional Pembentukan Lembaga Desa	Desa	1,00 kali	200 orang	Nopember	1.450.000	PAD	swakelota	Kasi Pemerintahan		
					3 Pembentukan Pengurus Karang Taruna Desa	16	Terpenuhinya Operasional Pembentukan Lembaga Desa	Terpenuhinya Operasional Pembentukan Lembaga Desa	Desa	1,00 kali	20 orang	Nopember	1.450.000	PAD	swakelota	Kasi Pemerintahan		
					4 Pembentukan Pengurus LPMD & KPMD	16	Terpenuhinya Operasional Pembentukan Lembaga Desa	Terpenuhinya Operasional Pembentukan Lembaga Desa	Desa	1,00 kali	20 orang	Nopember	700.000	PAD	swakelota	Kasi Pemerintahan		
					5 Penjaringan Perangkat Desa (Silpa ADD)		Terpenuhinya Penjaringan Perangkat Desa	Penjaringan Perangkat Desa	Desa	1,00 kali	2 orang	Oktober	72.270.169	Silpa PAD	swakelota	Kasi Pemerintahan		
					6 Pelantikan Perangkat Desa (Silpa ADD)		Terpenuhinya Penjaringan Perangkat Desa	Terpenuhinya Penjaringan Perangkat Desa	Desa	1,00 kali	2 orang	Oktober	4.050.000	Silpa PAD	swakelota	Kasi Pemerintahan		
					7 Mutasi Perangkat Desa (Silpa ADD)		Terpenuhinya Mutasi Perangkat Desa	Terpenuhinya Mutasi Perangkat Desa	Desa	1,00 kali	2 orang	Juli	14.195.000	Silpa PAD	swakelota	Kasi Pemerintahan		
					8 Pelantikan Mutasi Perangkat Desa (Silpa ADD)		Terpenuhinya Mutasi Perangkat Desa	Terpenuhinya Mutasi Perangkat Desa	Desa	1,00 kali	2 orang	Juli	4.250.000	Silpa PAD	swakelota	Kasi Pemerintahan		
	1.5	Sub Bidang Pertanahan		1.5.1	Sertifikasi Tanah Kas Desa													

No	Bidang / Sub Bidang / Jenis kegiatan					Mendukung SDGs Desa ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2025	Lokasi (RT/RW/ Desa)	Volume	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (swakelola/ kerjasama antar desa/ kerjasama pihak ketiga)	Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA)
	Bidang		Sub Bidang		Jenis kegiatan								Jumlah (Rp.)	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					1 Penyerbikan Tanah Kas Desa	16	terpenuhinya legalitas Tanah Kas desa	terpenuhinya legalitas Tanah Kas desa	Desa	1,00 paket	9 orang	Maret s.d Oktober	20.000.000	PAD	swakelola	Kasi Pemerintahan
				1.5.6	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)											
					1 Biaya Pajak Bumi & Bangunan Desa	16	terpenuhi tertib pajak PBB Desa	terpenuhinya tertib pajak PBB Desa	Desa	1,00 paket	4 orang	Januari s.d Maret	14.000.000	PAD	swakelola	Kasi Pemerintahan
Jumlah Per Bidang 1													1.320.789.890			
2	Pembangunan Desa	2.1	Sub Bidang Pendidikan	2.1.1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**											
					1 Kegiatan Honor Pengajar TK Pertiwi 1, 2 & 4	4,16	12 orang terpenuhi honor pengajar TK	12 orang terpenuhinya honor pengajar TK	Desa	1,00 paket	12 orang	12 bulan	21.600.000	DDS	swakelola	Kasi Pelayanan
				2.1.2	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa											
					1 Kegiatan Operasional Perpustakaan Desa	4	telah terpenuhi penyelenggaraan Perpustakaan Desa	telah terpenuhi penyelenggaraan Perpustakaan Desa	Desa	1,00 paket	Masyarakat Desa	Januari s.d Desember	10.000.000	DDS	swakelola	Kasi Pelayanan
				2.1.6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**											
					1 Kegiatan Rehab TK Pertiwi 1	4	telah terpenuhi sarpras TK pertiwi 1	telah terpenuhi sarpras TK pertiwi 1	RT 10	1,00 paket	Masyarakat Desa	Januari s.d Desember	20.000.000	Silpa DDS	swakelola	Kasi Kesra
		2.2	Sub Bidang Kesehatan	2.2.2	Penyelenggaraan Posyandu											
					1 Kegiatan Gerakan Sayang Ibu (20 orang)	3,5	terpenuhi gizi ibu & anak	terpenuhinya gizi ibu & anak	Desa	240,00 unit	Masyarakat Desa	12 bulan	12.000.000	DDS	swakelola	Kasi Pelayanan
					2 Kegiatan PMT Lansia (300 orang)	3,5	terpenuhi gizi lansia	terpenuhinya gizi lansia	Desa	3.600,00 orang	Masyarakat Desa	12 bulan	29.400.000	DDS	swakelola	Kasi Pelayanan
					3 Kegiatan PMT Balita (220 anak)	3,5	terpenuhi gizi balita	terpenuhinya gizi balita	Desa	2.640,00 unit	Masyarakat Desa	12 bulan	39.600.000	DDS	swakelola	Kasi Pelayanan
					4 Kegiatan Penanganan Balita Stunting (10 anak)	3,5	terpenuhi gizi anak stunting	terpenuhinya gizi anak stunting	Desa	120,00 orang	Masyarakat Desa	12 bulan		DDS	swakelola	Kasi Pelayanan
					6 Kegiatan Insentif Kader Kesehatan (70 orang)	3,5	70 orang terpenuhi pagu minimal	70 orang terpenuhinya pagu minimal	Desa	840,00 OB	Masyarakat Desa	12 bulan	21.000.000	DDS	swakelola	Kasi Pelayanan

No	Bidang / Sub Bidang / Jenis kegiatan				Mendukung SDGs Desa ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2025	Lokasi (RT/RW/ Desa)	Volume	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan	Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA)			
	Bidang		Sub Bidang	Jenis kegiatan								Jumlah (Rp.)	Sumber Dana	(swakelola/ kerjasama antar desa/ kerjasama pihak ketiga)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
					7 Kegiatan Posyandu Remaja (300 orang)	3,5	Terpenuhi akan SDM remaja	Terpenuhinya akan SDM remaja	Desa	3.600,00 orang	Masyarakat Desa	12 bulan	27.000.000	DDS	swakelola	Kasi Pelayanan		
					8 Kegiatan Insentif Kader Kesehatan Desa (ILP)	3,5	2 orang terpenuhi pagu minimal	2 orang terpenuhinya pagu minimal	Desa	24,00 OB	Masyarakat Desa	12 bulan	9.000.000	DDS	swakelola	Kasi Pelayanan		
					2.2.3 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan													
					1 Penyuluhan/sosialisasi eksklusif dan MPASI (20 orang)	3,5	belum terpenuhi SDM Ibu Balita	Terpenuhi akan SDM Ibu Balita	Desa	20,00 orang	Masyarakat Desa	12 bulan	1.830.000	DDS	swakelola	Kasi Pelayanan		
					2 Pelatihan Kader Posyandu (70 orang)	3,5	belum terpenuhi SDM Kader Kesehatan	terpenuhi SDM Kader Kesehatan	Desa	70,00 orang	Masyarakat Desa	12 bulan	4.770.000	DDS	swakelola	Kasi Pelayanan		
					2.2.4 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan													
					1 Pengadaan Mobil Siaga	3,5	belum terpenuhi Sarana Pemdes	belum terpenuhi Sarana Pemdes	Desa	9,00 orang	Masyarakat Desa	12 bulan	245.000.000	PAD	swakelola	Kasi Pelayanan		
					2 Kegiatan Pemicuan Sanitasi Sehat (STBM)	3,5	belum terpenuhi Sanitasi Sehat	belum terpenuhi Sanitasi Sehat	RT 1,2,3,4,16,5, 6,12,13	1.200,00 orang	Masyarakat Desa	12 bulan	10.000.000	DDS	swakelola	Kasi Pelayanan		
			2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.3.1 Pemeliharaan Jalan Usaha Tani														
					1 Kegiatan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Sri Luwih 8	1,2	terpenuhi kesejahteraan PKTD	terpenuhinya kesejahteraan PKTD	Sri Luwih 8	500,00 m	Masyarakat Desa	oktober	11.700.000	DDS	swakelola	Kasi Pelayanan		
				2.3.10 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa														
					1 Kegiatan Pengecoran Jalan Desa Dukuh Banyuning s.d Dukuh Sidoharjo	9	belum terpenuhi pembangunan Jalan Desa	terpenuhi pembangunan Jalan Desa	RT 4	176,00 m	Masyarakat Desa	Juni	65.919.400	DDS	swakelola	Kasi Kesra		
					2 Kegiatan Lanjutan Pengecoran Jalan Desa Dukuh Pungkrut RT 5	9	belum terpenuhi pembangunan Jalan Desa	terpenuhi pembangunan Jalan Desa	RT 5	231,00 m	Masyarakat Desa	September	85.060.600	DDS	swakelola	Kasi Kesra		
					3 Pengaspalan Jalan Desa RT 14 & 15 Sidoharjo Sidoharjo Sragen	9	belum terpenuhi pembangunan Jalan Desa	terpenuhi pembangunan Jalan Desa	RT 14 & 15	230,00 m	Masyarakat Desa	September	100.000.000	PBK	swakelola	Kasi Kesra		
				2.3.11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **														
					1 Lanjutan Pengaspalan Jalan Dukuh Sidomulyo RT 2 & 16	9	belum terpenuhi pembangunan Jalan Desa	terpenuhi pembangunan Jalan Desa	RT 2 & 16	112,60 m	Masyarakat Desa	Juli	50.000.000	PBP	Pihak Ketiga	Kasi Kesra		

No	Bidang / Sub Bidang / Jenis kegiatan				Mendukung SDGs Desa ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2025	Lokasi (RT/RW/ Desa)	Volume	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksana an	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (swakeelola/ kerjasama antar desa/ kerjasama pihak ketiga)	Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA)			
	Bidang		Sub Bidang	Jenis kegiatan								Jumlah (Rp.)	Sumbe Dana					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
					2 Lanjutan Pengaspalan Jalan Desa Dukuh Pungkruk RT 05	9	belum terpenuhi pembangunan Jalan Desa	terpenuhi pembangunan Jalan Desa	RT 05	112,80 m	Masyarakat Desa	Juli	30.000.000	PBP	Pihak Ketiga	Kasi Kesra		
					2.3.14 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa													
					1 Kegiatan Lanjutan Pembangunan Talud Jalan Usaha Tani	1, 2, 9	belum terpenuhi pembangunan prasarana jalan desa	terpenuhi pembangunan prasarana jalan desa	Sri Luwih 1	200,00 m	Masyarakat Desa	Mei	50.000.000	DDS	swakeelola	Kasi Kesra		
					2.3.15 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan													
					1 Kegiatan Rehab Gedung Saptawati (eks. SMP)		belum terpenuhi pembangunan sarpras gedung desa	terpenuhi pembangunan sarpras gedung desa	Desa	420,00 m	Masyarakat Desa	Mei	200.000.000	Silpa DDS	swakeiela	Kasi Kesra		
					2 Lanjutan Pembangunan Gedung Serba Guna		belum terpenuhi pembangunan sarpras gedung desa	terpenuhi pembangunan sarpras gedung desa	Desa	1,00 unit	Masyarakat Desa	Oktober	100.000.000	BKK	swakeiela	Kasi Kesra		
					2.3.17 Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **													
					1 Kegiatan Pembuatan Peta Batas Desa	16	terpenuhi dokumen peta batas desa	terpenuhi dokumen peta batas desa	Desa	1,00 paket	9 orang	Mei	50.000.000	DDS	swakeiela	Kasi Pemerintahan		
					2.3.18 Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa													
					1 Kegiatan Pemutakhiran Pembuatan Master Plan Desa	16	terpenuhinya Master Plan Desa	terpenuhinya Master Plan Desa	Desa	1,00 paket	4.045 orang	Mei	60.000.000	DDS	swakeiela	Kasi Pemerintahan		
			2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	2.5.1 Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa														
					1 Kegiatan Penanaman Pohon	16	terpenuhinya pengelolaan lingkungan desa	terpenuhinya pengelolaan lingkungan desa	Desa	1,00 paket	4.045 orang	Mei	20.000.000	DDS	swakeiela	Kasi Kesra		
		2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	2.6.2 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa															
				1 Pengaduan MMT informasi Realisasi, penetapan & Perubahan APB Desa	16	terpenuhi transparansi informasi pelaksanaan anggaran desa	terpenuhinya transparansi informasi pelaksanaan anggaran desa	Desa	3,00 kali	4.045 orang	Januari, Juli & Desember	4.500.000	PAD	swakeiela	Kasi Pemerintahan			

No	Bidang / Sub Bidang / Jenis kegiatan					Mendukung SDGs Desa ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2025	Lokasi (RT/RW/ Desa)	Volume	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanasan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (swakelola/ kerjasama antar desa/ kerjasama pihak ketiga)	Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA)	
	Bidang	Sub Bidang		Jenis kegiatan	Jumlah (Rp.)								Sumbe Dana				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Jumlah Per Bidang 2													1.288.400.000				
3	Pembinaan Kemasyarakatan	3.1	Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	3.1.2	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)												
					1	Honorarium Linmas	11	31 orang telah memenuhi pagu definitif	31 orang telah memenuhi pagu definitif	Desa	1,00 tahun	31 orang	Desember	15.500.000	ADD	swakelola	Kasi Pelayanan
				3.1.5	Pelatihan Kesiapsiagaan/ Tanggap Bencana Skala Lokal Desa												
					1	Operasional Destana	3	belum terpenuhi sarpras Destana	terpenuhi sarpras Destana	Desa	1,00 paket	40 orang	Januari s.d Desember	20.000.000	DDS	swakelola	Kasi Pelayanan
		3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	3.2.3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (persayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa												
					1	Bantuan Pelaksanaan HUT Tingkat dukuh	11	terpenuhinya kebutuhan reguler	terpenuhinya kebutuhan reguler	Desa	1,00 paket	4.045 orang	Agustus	3.000.000	PAD	swakelola	Kasi Pelayanan
					2	Bantuan Pelaksanaan Keagamaan Tingkat Dukuh	11	terpenuhinya kebutuhan reguler	terpenuhinya kebutuhan reguler	Desa	1,00 paket	4.045 orang	Maret - April	9.000.000	PAD	swakelola	Kasi Pelayanan
		3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.3.5	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**												
					1	Kegiatan Lanjutan Pembangunan Lapangan Desa	11	belum terpenuhi sarpras olahraga	terpenuhi olahraga	Desa	1,00 paket	4.045 orang	agustus - September	-	DDS	swakelola	Kasi Kesra
		3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	3.4.2	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD												
					1	Pembinaan LPMD	11	terpenuhi operasional LPMD	terpenuhinya operasional LPMD	Desa	1,00 paket	3 orang	12 bulan	12.000.000	ADD	swakelola	Kasi Pelayanan
					2	Pembinaan KPMD	11	terpenuhi operasional KPMD	terpenuhinya operasional KPMD	Desa	1,00 paket	5 orang	12 bulan	5.000.000	PAD	swakelola	Kasi Pelayanan
				3.4.3	Pembinaan PKK												
					1	Honor Pengurus Inti TP PKK	4,11	7 orang telah memenuhi pagu definitif	7 orang telah memenuhi pagu definitif	Desa	7,00 orang	7 orang	Juni & Desember	2.600.000	ADD	swakelola	Kasi Pelayanan

No	Bidang / Sub Bidang / Jenis kegiatan					Mendukung SDGs Desa ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2025	Lokasi (RT/RW/ Desa)	Volume	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (swakelola/ kerjasama antar desa/ kerjasama pihak ketiga)	Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA)
	Bidang		Sub Bidang		Jenis kegiatan								Jumlah (Rp.)	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					2. Operasional PKK	4.11	terpenuhi kebutuhan reguler	terpenuhinya kebutuhan reguler	Desa	1,00 paket	40 orang	12 bulan	12.000.000	ADD	swakelola	Kasi Pelayanan
					3. Operasional PKK	4.11	terpenuhi kebutuhan reguler	terpenuhinya kebutuhan reguler	Desa	1,00 paket	40 orang	12 bulan	5.000.000	PAD	swakelola	Kasi Pelayanan
Jumlah Per Bidang 3													54.300.000			
4	Pemberdayaan Masyarakat	4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	4.2.3	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)											
					1. Kegiatan Pembangunan sumur sawah	1, 2	terpenuhinya Ketahanan Pangan Desa	terpenuhinya Ketahanan Pangan Desa	Sri Luwih 1	1,00 unit	Masyarakat Desa	Agustus	113.038.000	DDS	swakelola	Kasi Pemerintahan
					2. Kegiatan Lanjutan Pembangunan Sumur Sawah Sri Luwih 3	1, 2	terpenuhinya Ketahanan Pangan Desa	terpenuhinya Ketahanan Pangan Desa	Sri Luwih 3	1,00 unit	Masyarakat Desa	Januari s.d Maret	67.502.150	Silpa DDS	swakelola	Kasi Pemerintahan
				4.2.4	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana											
					1. Kegiatan Pemeliharaan Saluran Tersier	1, 2	belum terpenuhi pemeliharaan saluran irigasi	terpenuhi pemeliharaan saluran irigasi	Sri Luwih 1,2,3,4,5,6,8	500,00 m	20 orang	April	5.500.000	DDS	swakelola	Kasi Pelayanan
		4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	4.3.1	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa											
					1. Bimtek Kepala Desa	4,8	terpenuhinya peningkatan kapasitas kepala desa	terpenuhinya peningkatan kapasitas kepala desa	Desa	1,00 kali	1 orang	Nopember	1.000.000	ADD	swakelola	Kasi Pemerintahan
				4.3.2	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa											
					1. Bimtek Perangkat Desa	4,8	terpenuhinya peningkatan kapasitas perangkat desa	terpenuhinya peningkatan kapasitas perangkat desa	Desa	1,00 kali	10 orang	Nopember	3.000.000	ADD	swakelola	Kasi Pemerintahan
				4.3.3	Peningkatan Kapasitas BPD											
					1. Bimtek BPD	4,8	terpenuhinya peningkatan kapasitas perangkat desa	terpenuhinya peningkatan kapasitas perangkat desa	Desa	1,00 kali	7 orang	Nopember	7.000.000	ADD	swakelola	Kasi Pemerintahan
		4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	4.4.1	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan											
					1. Kegiatan Penyuluhan Perempuan	4	belum terpenuhi pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan bagi perempuan	terpenuhinya pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan bagi perempuan	Desa	1,00 paket	50 orang	3 kali	6.000.000	DDS	swakelola	Kasi Pelayanan
				4.4.2	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak											

No	Bidang / Sub Bidang / Jenis kegiatan					Mendukung SDGs Desa ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2025	Lokasi (RT/RW/ Desa)	Volume	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (swakeola/ kerjasama antar desa/ kerjasama pihak ketiga)	Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA)
	Bidang		Sub Bidang		Jenis kegiatan								Jumlah (Rp.)	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					1 Kegiatan Penyuluhan Perlindungan Anak	4	belum terpenuhinya pelatihan dan penyuluhan kesadaran perlindungan bagi anak	terpenuhinya pelatihan dan penyuluhan kesadaran perlindungan bagi anak	Desa	1,00 paket	70 orang	April	5.000.000	DDS	swakeola	Kasi Pelayanan
					4.4.3 Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)											
					1 Kegiatan Penguatan Penyandang Difabel	4	belum terpenuhinya pelatihan dan penguatan disabilitas	terpenuhinya pelatihan dan penguatan disabilitas	Desa	1,00 paket	20 orang	Mei	5.000.000	DDS	swakeola	Kasi Pelayanan
					4.4.99 lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga (BLT)											
					1 Bantuan Langsung Tunai	1, 3	belum terpenuhinya pengentasan kemiskinan ekstrem	belum terpenuhinya pengentasan kemiskinan ekstrem	Desa	12,00 bulan	22 KPM	Januari s.d Desember	79.200.000	DDS	swakeola	Kasi Pelayanan
			4.5 Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	4.5.1	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM											
					1 Kegiatan Pelatihan Manajemen UMKM	8, 9	belum terpenuhinya pelatihan UMKM	belum terpenuhinya pelatihan UMKM	Desa	1,00 paket	20 orang	Juli	10.000.000	DDS	swakeola	Kasi Pelayanan
					2 Kegiatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih	9	terpenuhinya Pembentukan KDMP	terpenuhinya Pembentukan KDMP	Desa	1,00 paket	20 Orang	Mei	5.000.000	DDS	swakeola	Kasi Pelayanan
			4.6 Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	4.6.99	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)											
					1 Kegiatan Penyertaan Modal Bumdes	9	terpenuhinya modal Bumdes	terpenuhinya modal Bumdes	Desa	1,00 paket	5 Orang	April	190.000.000	DDS	swakeola	Kasi Pelayanan
			4.7 Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	4.7.2	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa											
					1 Kegiatan Lanjutan Pembangunan Lingkungan Kios Desa Taman Saptawati	9	terpenuhinya sarpras kios desa	terpenuhinya sarpras kios desa	Desa	1,00 unit	30 Orang	April	50.000.000	DDS	swakeola	Kasi Kesra
					2 Kegiatan Lanjutan Pembangunan Lingkungan Kios Desa Taman Singodimejo	9	terpenuhinya sarpras kios desa	terpenuhinya sarpras kios desa	Desa	1,00 unit	30 Orang	April	100.000.000	DDS	swakeola	Kasi Kesra

No	Bidang / Sub Bidang / Jenis kegiatan					Mendukung SDGs Desa ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2025	Lokasi (RT/RW/ Desa)	Volume	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksana an	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (swakelola/ kerjasama antar desa/ kerjasama pihak ketiga)	Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA)
	Bidang		Sub Bidang		Jenis kegiatan								Jumlah (Rp.)	Sumbe Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				4.7.4	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pen dampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) **											
				1	Pembentukan Kelompok UMKM	8, 9	terpenuhinya kelompok UMKM	terpenuhinya kelompok UMKM	Desa	1,00 paket	20 orang	Juni	10.000.000	DDS	swakelola	Kasi Pelayanan
Jumlah Per Bidang 4													657.240.150			
JUMLAH TOTAL													3.360.730.040			

Desa Sidoharjo, Tanggal 07 Juli 2025
 Disusun oleh :
 Sekretaris Desa Sidoharjo

 
 M. SAPTAWATI, S.Pd, MH